

Religion Identity And Political Polarization: How Does Labeling Make It Worst?

¹Nahrul Hayat, ²Nurhakki

¹ Institut Agama Islam Negeri Parepare

Jl. Amal Bhakti No.8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare

E-mail: nahrulhayat@iainpare.ac.id , nurhakki@iainpare.ac.id

Abstract

Prabowo's joining of President Jokowi's cabinet is expected to end the polarization of tadpoles versus "kampret". But now, a new label appears called 'Kadrun' or Lizard of the Desert form. Political commentators often use Kadrun on social media as a unique nickname for parties or people against the government. This paper aims to describe the situation of political polarization in Indonesia with the use of religious identity. The analysis focuses on the traces of political labelling "kadrun" on social media that amplify political polarization. The approach used is the descriptive qualitative semiotic framework of Roland Barthes and the concept of labelling as political communication propaganda. The results showed that labelling techniques were used as political propaganda. Kadrun was originally political labelling about the religious identity of certain groups with a political position as opposed to the government. The use of the term kadrun vs cebong on social media by many political commentators has further widened political polarization.

Keywords: Labeling, Polarization, Propaganda, Religion Identity, Semiotics.

Abstrak

Masuknya Prabowo dalam kabinet Presiden Jokowi diharapkan menjadi akhir dari polarisasi kecebong versus kampret. Namun kini muncul label baru bernama 'Kadrun' atau bentuk Kadal Gurun. Kadrun sering digunakan oleh para komentator politik di media sosial sebagai julukan khusus bagi partai atau orang yang menentang pemerintah. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan situasi polarisasi politik di Indonesia dengan penggunaan identitas keagamaan. Fokus analisis adalah jejak-jejak pelabelan politik "kadrun" di media sosial yang memperkuat polarisasi politik. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan kerangka semiotika Roland Barthes dan konsep labeling sebagai propaganda komunikasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik pelabelan digunakan sebagai sarana propaganda politik. Kadrun pada awalnya merupakan pelabelan politik tentang identitas keagamaan kelompok tertentu yang memiliki posisi politik sebagai oposisi terhadap pemerintah. Penggunaan istilah kadrun vs cebong di media sosial oleh sejumlah komentator politik semakin melebarkan polarisasi politik.

Kata Kunci: Identitas Agama, Polarisasi, Propaganda, Semiotika, Pelabelan

Pendahuluan

Kajian politik dari perspektif ilmu komunikasi memasuki generasi ketiga yang ditandai dengan munculnya media baru (*new media*). Era media baru membuka ruang kebebasan ekspresi politik yang semakin luas. Arus persaingan elit politik tingkat nasional dengan mudah beresonansi ke daerah dan akar rumput. Persoalan muncul ketika hadirnya kemudahan akses informasi tidak berimbang dengan kedewasaan berdemokrasi. Salah satu dampaknya adalah semakin tajamnya polarisasi politik di tengah masyarakat. Persepsi ini sesuai dengan hasil survei *Centre for International Governace Innovation* (CIGI) dan Ipsos pada Tahun 2019 menunjukkan sebanyak 58% responden di Indonesia setuju bahwa media sosial dapat meningkatkan polarisasi politik.¹

Fenomena polarisasi politik di Indonesia menjadi sangat jelas terlihat, namun di sisi lain hanya sedikit (untuk tidak mengatakan tidak ada) kajian akademik yang fokus menelitinya. Menurut Karim, perhatian kajian politik masih dinominasi oleh analisis elektoral yang sering dilakukan dengan pendekatan yang normatif. Perlu digarisbawahi bahwa polarisasi tidak saja menjadi sub-kajian ilmu politik melainkan sangat bertaut pada dinamika komunikasi politik. Asumsi logis yang mendasari hal ini adalah intensitas komunikasi politik akan memengaruhi keberpihakan politik dan sensitifitas komunikasi politik akan membuat fanatisme politik menjadi lebih kokoh.²

Terdapat tiga generasi komunikasi politik dilihat dari perkembangan dinamika yang ada. Generasi pertama dikenal dengan istilah retorika politik, yang mana kemampuan berbicara (seni berpidato) menjadi hal yang penting sebab pesan-pesan dalam komunikasi menjadi sorotan utama panggung depan politik. Generasi kedua ditandai dengan dominasi peran media massa atau yang juga disebut media arus utama (*mainstream*). Terakhir, generasi ketiga yang dipicu oleh perkembangan media baru.³ Pada fase ini kombinasi

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/14/media-sosial-meningkatkan-polarisasi-politik-di-indonesia> (diakses 4 Mei 2021)

² Karim, Abdul Gafar. 2019. *Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan Bagi Agenda Riset*. Politika: Jurnal Ilmu Politik: Volume 10, NO. 2. Hal:220.

³ Heryanto, G. G., & dan Rumar, S. (2013). *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal 161.

antara kemajuan teknologi komunikasi dan demokrasi inilah yang kemudian disebut sebagai fenomena *cyberdemocracy*.⁴

Salah satu kajian terkini menyoal hubungan identitas dan polarisasi adalah tulisan Francis Fukuyama dalam buku berjudul *Identity: The Demand for Dignity and The Politics of Resentment*, diterbitkan di Amerika Serikat pada tahun 2018. Hal menarik dalam buku tersebut adalah gagasan Fukuyama mengenai konsep *Thymos*. *Thymos* adalah bagian dari jiwa manusia yang selalu haus pengakuan atas harga diri. Dahaga ini menjadi faktor penentu cara manusia memperjuangkan identitas diri dan kelompok, sekaligus menjadi pendorong fanatisme identitas suku, agama, ras, golongan, dan bangsa. Faktor *thymos* inilah yang menjadi akselerator polarisasi dalam masyarakat.⁵

Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia. Artinya, identitas dominan masyarakat Indonesia adalah umat muslim. Itu sebabnya polarisasi politik berbasis identitas agama menjadikan pemeluk agama Islam sebagai sorotan utama, tanpa mengabaikan faktor identitas lain seperti suku dan golongan. Asumsi ini diperkuat oleh beberapa hasil kajian yang menunjukkan adanya polarisasi yang tidak dilatari oleh pembelahan umat beragama, melainkan polarisasi internal dalam tubuh ummat Islam itu sendiri.⁶

Pasca pemilihan gubernur DKI pada tahun 2017, situasi polarisasi politik menggunakan identitas agama semakin meningkat.⁷ Situasi ini terus berlanjut jelang Pilpres 2019. Perang simbol agama terus dipertontonkan oleh elit nasional. Pada tanggal 27 Juli 2018, sejumlah ulama Alumni 212 dan politikus melakukan ijtima ulama untuk mendukung pasangan Prabowo Sandi. Hal ini kemudian direspon oleh pengusung Joko Widodo dengan menjadikan mantan ketua Majelis Ulama Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden. Alhasil keterbelahan dukungan politik di kalangan umat Islam semakin terpolarisasi. Muslim Nahdhiyin versus Non-Nahdhiyin semakin mengemuka.

⁴Hartley, John.(2010). *Communication, Cultural And MediaStudies: Konsep Kunci*.Yogyakarta: Jalasutra. Hal:84

⁵ Fukuyama, Francis. (2018). *Identity: The Demand for Dignity and The Politics of Resentment*. New York: Farrar, Straus and Giroux. Hal:24.

⁶ Aspinall, E., Dettman, S., & Warburton, E. (2011). *When Religion Trumps Ethnicity: A Regional Election Case Study From Indonesia*. 19(1), 27-58. <https://doi.org/10.5367/sear.2011.0034>

⁷ Hadiz, V. R. (2018). *Imagine All the People? Mobilizing Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia*. *Journal of Contemporary Asia*, 48(4), 566-583.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan suatu fenomena dan peristiwa secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai subjek dan objek penelitian.⁸ Penelitian deskriptif adalah formula penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Fenomena yang dimaksud dapat berupa transmisi makna makan pesan melalui kode verbal dan nonverbal. Informan ahli dalam penelitian ini adalah Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin sekaligus penulis buku *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Hafied Cangara. Informan praktisi adalah Anggota DPR RI Fraksi PAN dan anggota DPRD Sul-Sel Fraksi PKB. Data primer penelitian ini bersumber dari konten media digital dan pustaka. Konten digital yang dianalisis dibatasi pada pemberitaan media online dan konten media sosial Youtube milik Cokro TV yang berjudul "Danny Siregar: Kadrun itu siapa?". Peneliti menggunakan kerangka semiotika Roland Barthes untuk menganalisis makna konotatif dan mitos dibalik teks. Mitos menurut Brathes adalah sebuah tipe wicara.⁹

Hasil dan Diskusi

1. Hasil Penelitian

a. Polarisasi Politik Era Pemerintahan Joko Widodo

Telah dibahas sebelumnya bahwa polarisasi di Indonesia juga disebabkan oleh perpecahan diantara sesama umat muslim. Pembelahan yang terjadi di permukaan mengikuti pola pembelahan "moderat vs. radikal". Dimana kelompok moderat diasosiasikan dengan pendukung Jokowi dan Ahok, sedangkan kelompok Radikal dituduh sebagai barisan pendukung Prabowo dan Anies. Bahkan muncul simplifikasi lain bahwa pendukung Jokowi itu suka tahlilan sedangkan yang anti Jokowi suka takbiran.¹⁰

⁸ Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

⁹ Barthes, Roland. 2013. *Mitologi (Edisi Revisi)*. Nurhadi, A. Sihabul Millah (terj). Bantul: Kreasi Wacana.

¹⁰ Karim, Abdul Gafar. 2019. *Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan Bagi Agenda Riset*. Politika: Jurnal Ilmu Politik: Volume 10, NO. 2. Hal:216

Rivalitas antara pro dan anti Jokowi dapat ditelusuri kembali pada Tahun 2016. Peristiwa yang memicu awal pembelahan adalah perkataan Ahok di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 bahwa dirinya akan memberi perlakuan yang sama terhadap seluruh warga DKI, meski ada yang “dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51”.¹¹ Pernyataan ini yang memicu amarah kelompok umat Islam sehingga terjadi Aksi bela Islam 411 dan aksi bela Islam 212. Ujung dari protes umat Islam adalah vonis pidana terhadap Ahok dalam kasus penistaan agama.

Polarisasi politik di masa Pilkada DKI memiliki pola yang sama dengan yang terjadi di skala nasional.¹² Pembacaan ini tidak berlebihan mengingat aktor utama pada dua level konteks politik tersebut adalah figur-fugur yang sama. Terdapat dua kubu besar dalam konflik tersebut, yaitu kelompok yang pro-Jokowi dan pro-Ahok di satu sisi dan kelompok yang anti-Jokowi dan anti-Ahok di pihak lainnya.¹³ Seperti diketahui Jokowi dan Ahok sebelumnya adalah pasangan pemenang Pilkada DKI Jakarta pada Tahun 2012.

Sentimen agama dalam politik berlanjut pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Calon Petahana Joko Widodo memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden. Sejak awal kondisi ini dikhawatirkan berpotensi mempertajam pembelahan umat. Bahkan peneliti senior LIPI Prof. Syamsuddin Haris memandang bahwa masuknya Kiai Haji Ma'ruf Amin ke dalam kontestasi politik nasional sebagai cawapres Joko Widodo berpotensi menimbulkan politisasi ulama dan politisasi agama.¹⁴

b. Komunikasi Politik Era Digital

Catatan sukses pemanfaatan media digital pada masa kampanye politik seperti Pilpres dibenarkan oleh tim Barack Obama pada saat Obama berhasil menduduki jabatan Presiden Tahun 2008. Dalam buku berjudul *Communicator-in-Chief: How Barack Obama Used New Media Technology to*

¹¹ Tapsell, R. (2017). Post-truth politics in Southeast Asia. Retrieved June 3, 2021, from Inside Story website: <https://insidestory.org.au/post-truth-politics-in-southeastasia>

¹² Marcus, M. (2018). *Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia*. Pacific Affairs, 91(2), 82–261. <https://doi.org/10.5509/201891226>

¹³ Waikar, Prashant, Nawab, M., & Osman, M. (2018). *Fear and Loathing: Uncivil Islamism and Indonesia's Anti-Ahok Movement*. Nanyang Technological University, 106, 89–109.

¹⁴ Faridah, Siti, and Mathias, Jerico. (2018). *Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa Dalam Pemilu*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Volume 4 No. 3, 489-506.

Win the White House dikatakan bahwa situs untuk kampanye Obama mengelola lebih dari seratus lima puluh ribu agenda kegiatan, mendirikan lebih dari tiga puluh lima ribu kelompok, dan mengelola lebih dari 1,5 juta akun. Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi media massa mengakibatkan diseminasi informasi di dunia dan mengakibatkan iklim komunikasi politik berada dalam ranah multimedia.¹⁵

Di Indonesia, tren penggunaan media internet atau media digital semakin masif pada tahun politik Pemilu dan Pilpres 2019. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia yang menjadi pengguna internet, hingga awal 2021 telah 200 juta jiwa.¹⁶ Akibatnya terjadi perubahan signifikan pola komunikasi yang sebelumnya linear menjadi transaksional. Kehadiran internet tidak saja menjanjikan efektifitas komunikasi yang lebih personal, namun juga menyisakan eksese negatif bagi demokrasi. Situasi ini melahirkan objek kajian baru mengenai penggunaan internet dalam komunikasi politik di Indonesia. Salah satu kajian terkini adalah penelitian oleh Jerry Indrawan berjudul: "*Cyberpolitics sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di Era Siber*". Artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Politica ini menggambarkan bagaimana kegiatan politik di masa depan yang akan didominasi oleh penggunaan media siber (*cyberpolitics*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cyberpolitics* dapat digunakan sebagai pilihan media komunikasi politik dan aktifitas politik yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka.¹⁷

a. New Media dan Ekspresi Politik

Popularitas media baru sebagai saluran komunikasi politik membetuk pola berdemokrasi yang disebut *cyberdemocray*.¹⁸ Ruang publik menjadi lebih terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan opini. Pada tataran ideal, kondisi ini sesuai dengan ekspekatasi Jurgen Habermas tentang ruang publik yang bisa diakses oleh semua warga dimana segala sesuatu menjadi

¹⁵ Efriza & Indrawan, J. (2018). *Komunikasi Politik: Pemahaman Secara Teoritis dan Empiris*. Malang: Intrans Publishing.

¹⁶ <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internetindonesia2021tembus202juta#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Pengguna%20internet%20di,dibandingkan%20pada%20Januari%202020%20lalu>. (diakses 4 Mei 2021).

¹⁷ Indrawan, J. (2019). *Cyberpolitics sebagai Perspektif Baru Memahami Politik Era di Siber*. Jurnal Politica, 10(1), 1-15.

¹⁸ Hartley, John.(2010). *Communication, Cultural And MediaStudies: Konsep Kunci*. Yogyakarta: Jalasutra. Hal : 43-45

boleh.¹⁹ Tentu hal ini juga paralel dengan meningkatnya ekspresi politik warga.

Pada saat yang sama ruang digital sebagai sebuah media komunikasi belum didukung oleh regulasi yang proporsional untuk menjaga kesehatan berdemokrasi. Akibatnya, tidak sedikit ekspresi politik pengguna internet (*netizen*) malampaui batas norma dan etis yang ada. *Hoax*, *hatespeech*, fitnah, dan propaganda hitam adalah deretan persoalan *cyberdemocracy* yang belum selesai. Perlu ditekankan bahwa propaganda politik tidak saja dimotori oleh kelompok oposisi, melainkan juga oleh pendukung pemerintah.

b. Labeling dan Propaganda Politik

Terdapat dua pendekatan konseptual untuk menjelaskan *labeling*. Pendekatan pertama mengacu pada pendekatan teoritik *labeling* berdasarkan pengembangan teori interaksi simbolik *George Herbert Mead*, yang kemudian diperkenalkan pertama kali oleh Howard S. Becker sebagai teori *labeling*. Pendekatan ini berfokus pada kajian penyimpangan perilaku (*deviance*). Pendekatan kedua adalah pemahaman *labeling* sebagai suatu teknik propaganda.²⁰ Pendekatan ini menempatkan *labeling* sebagai alat konstruksi sosial dan pembentukan opini publik. Artikel ini memadukan kedua pendekatan untuk kelengkapan analisis lokus penelitian.

Teori interaksi simbolik Mead juga dikenal dengan istilah teori perilaku sosial (*social behaviorism*). Teori ini membahas tentang bagaimana pikiran dan diri dibentuk dan dimediasi oleh interaksi sosial melalui penggunaan tanda dan simbol dalam komunikasi.²¹ Dengan kata lain teori ini berpendapat bahwa konsep diri adalah respon atas stimulus proses sosial. Seseorang akan berperilaku berdasarkan citra mental yang mendefinisikan konsep dirinya. Itu sebabnya, teori interaksi simbolik dapat memberikan penjelasan sosiologis terhadap suatu perilaku. Berikutnya, bagian dari perilaku yang dianggap menyimpang akan dikaji dalam teori *labeling*.

¹⁹ Habermas, J. (2010). *Ruang Publik, Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis* (terj.). Bantul: Kreasi Wacana.

²⁰ Cangara, Hafied. (2014). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal: 272

²¹ Mead, George Herbert. (1934). *Mind, Self, and Society*. ed. C. w. Morris. Chicago: University of Chicago.

Labeling atau penjulukan diperkenalkan oleh Howard Becker pada tahun 1963. Becker menerapkan konsep penjulukan orang-orang yang berperilaku menyimpang (*devians*). Teori ini berposisi terhadap perspektif struktural fungsional yang mempertentangkan deviasi dengan norma sosial. Teori *labeling* Becker tidak memandang deviasi sebagai sebuah perilaku yang menyimpang melainkan sebuah penjulukan pada seseorang atau dengan kata lain, deviasi bukan sesuatu yang bersifat inheren terhadap perilaku, tapi merupakan suatu justifikasi eksternal melalui penjulukan. Menurut Becker, "*seorang deviasi adalah orang yang mendapatkan label dan menjalankan perilaku deviasi sesuai dengan label yang diberikan orang-orang kepadanya*".²² Pandangan ini sejalan dengan penjelasan dalam buku *A Handbook for The Study of Mental Health* yang mengatakan bahwa *labeling* bekerja melalui proses generalisasi kepribadian tanpa penilaian perilaku satu per satu. Seseorang akan didefenisikan melalui identitas label yang diberikan kepadanya.²³

Ada dua asumsi dasar dari teori *labeling*. *Pertama*, penilaian deviasi dan normalitas perilaku orang tergantung pada bagaimana orang lain menilainya. Penilaian ini tentu dipengaruhi oleh predisposisi sistem nilai yang dianut oleh seseorang. Predisposisi dalam hal ini adalah konfigurasi nilai sosial, agama, kelompok dan preferensi politik yang kemudian akan menjadi alat ukur dalam memandang dan menilai perilaku. Dalam bahasa lain, *frame of reference* adalah variabel yang memengaruhi cara menilai seseorang sehingga timbul asosiasi sifat pada identitas tertentu. *Kedua*, teori *labeling* menyatakan bahwa penilaian yang diberikan dapat berubah seiring waktu. Misalnya, seorang politisi sebelumnya dinilai merakyat bisa jadi menjadi sosok yang dipandang elit di kemudian hari, dan juga sebaliknya.

Konteks *labeling* dalam kehidupan politik berbicara tentang penggunaan penjulukan yang bermotif dan bertujuan politik. Politik sebagai arena persaingan pengaruh dan perebutan kekuasaan akan dikelola melalui strategi justifikasi perilaku menyimpang atau negatif terhadap pihak kompetitor. Politik elektoral di negara demokrasi menjadikan citra publik adalah yang utama. Meskipun kekuasaan adalah tujuan akhirnya, namun citra baik adalah modal wajibnya. Pada titik ini, segala strategi komunikasi

²² Becker, H. (1963). *Outsider: Studies In The Sociology Of Deviance*. New York: The Free Press. Hal 92-95

²³ Scheid, T.L. & Brown T.N., (2012). *A Handbook for the Study of Mental Health*. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press

politik akan diupayakan untuk mencitrakan diri sebagai orang baik yang berperilaku baik sedangkan pihak lawan adalah sebaliknya.

Teknik propaganda dalam komunikasi politik bukanlah hal baru. Bahkan kemunculan kajian komunikasi politik modern diawali dengan analisis propaganda oleh Harold De Lasswell dalam bukunya "*Propaganda Technique in The World War I*". Lasswell menceritakan bahwa Menteri Propaganda Jerman waktu itu, Dr. Joseph Gobbels, mengatakan bahwa "*propaganda tidak mengenal aturan dan etika*". Tujuan propaganda semata-mata untuk memanipulasi rakyat dengan segala cara demi mencapai tujuan yang diinginkan. Jerman waktu itu adalah kekuatan blok sentral yang mengkampanyekan ideologi fasisme. Konteks perang bersenjata pada masa itu memiliki strategi komunikasi politik yang serupa dengan konteks perang citra pada persaingan politik elektoral hari ini. Itu sebabnya propaganda politik selalu diwarnai dengan aksi penjulukan. Disamping itu propaganda labeling dapat memiliki daya mobilisasi yang kuat dengan mengeksploitasi dimensi *tymos* masyarakat.²⁴

2. Pembahasan

a. Dari 'Kampret' menjadi 'Kadrun'

Bentuk labeling yang paling populer di masa Pilpres 2019 adalah cebong versus kampret. Cebong adalah julukan untuk pendukung Jokowi-Amin, sedangkan kampret adalah julukan untuk pendukung Prabowo-Sandi. Tentu julukan ini dimaksudkan untuk merendahkan masing-masing pendukung dengan berbagai asosiasi negatif dari makna julukannya. Setelah KPU menetapkan pasangan Jokowi-Amin sebagai pemenang dalam Pilpres 2019, berbagai pihak mengusulkan rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi untuk meredam polarisasi politik cebong-kampret pasca Pilpres. Pada akhirnya Prabowo Subianto bergabung dalam kabinet jilid 2 Joko Widodo.

Harapan berakhirnya polarisasi politik pasca rekonsiliasi Jokowi-Prabowo benar hanya berakhir sebagai harapan. Pasalnya, sebagian besar penyandang gelar "kampreters", yakni para pendukung Prabowo justru semakin kecewa. Diantara pemimpin kelompok oposisi ini yang paling banyak disorot media adalah kelompok Islam alumni 212 dan anggota

²⁴ Lasswell, H. D., (1971). *Propaganda Technique in The World War I*. (revised ed.). Cambridge: M.I.T. Press.

organisasi masyarakat Front Pembela Factors Affecting the Inter-Religious Harmony in Jayapura

. Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) muncul sebagai tokoh pemimpin oposisi non partai. Profil pribadi Habib Rizieq yang merupakan keturunan Arab dan juga keturunan dari Nabi Muhammad SAW menjadi inspirasi labeling berikutnya. Propaganda politik memasuki babak baru dengan mendikotomikan umat Islam menjadi Islam Arab dan Islam moderat (nusantara). Islam Arab diatribusikan kepada kelompok oposisi yang dinominasi oleh kelompok FPI dan alumni 212. Sedangkan Islam nusantara adalah kelompok Islam pendukung Islam cenderung membela pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Kembalinya Habib Rizieq ke Indonesia 10 November 2020 semakin memanaskan iklim politik tanah air. Perang opini di ranah media sosial kembali dipenuhi dengan bentuk labeling yang lebih baru. Kampret sudah melebur jadi cebong. Tersisa kelompok Islam yang dilabelisasi sebagai kelompok "kadrin". Kadrin sendiri adalah singkatan dari kadal gurun. Istilah ini pada awal kemunculannya secara konotatif merujuk pada kelompok oposisi keturunan Arab. Pada perkembangan berikutnya seluruh pendukungnya yang bahkan bukan muslim dan bukan Arab. Imbasnya, ketokohan HRS kembali menjadi ancaman bagi pemerintah sebagaimana dikatakan oleh Profesor Hafied Cangara dalam sebuah kesempatan wawancara di kediamannya pada bulan Maret 2021, *Propaganda labeling ini (kadrin) menunjukkan adanya gejala penguasa (pemerintahan Joko Widodo) khawatir terhadap bangkitnya gerakan politik Islam yang dimotori oleh kelompok Habib Rizieq di Indonesia*".

Tidak sulit untuk menemukan label kadrin di media sosial. Cukup kunjungi akun *Twitter* atau channel *Youtube* yang memiliki konten kritik terhadap pemerintah. Setelah itu buka kolom komentar maka akan ditemui kata Kadrin, beserta sederet julukan negatif lainnya seperti, radikal, khilafah, bahkan teroris. Labelisasi ini juga mendapat perhatian salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN), Drs. H. Ashabul Kahfi, M. Ag., saat penulis melakukan wawancara terkait *labeling* sebagai berikut;

"Semua bentuk labeling, sejatinya merupakan tindakan kekerasan verbal dan psikologis. Teroris misalnya, jika memang cukup bukti, saya kira Densus 88 atau BNPT bisa mengambil tindakan tegas. Tapi jika sekadar digunakan untuk menghabisi karakter orang lain, saya pikir ini wujud nyata tindakan kekerasan".

b. Mitos Dibalik Labeling Identitas Agama

Diantara beberapa label politik yang populer di twitter, Kadrun menempati urutan pertama. Dalam satu bulan terakhir, mengacu pada perhitungan Ismail Fahmi dari Drone Emprit, istilah cebong sudah menurun hingga 49.405 cuitan dan kampret sebanyak 71.313 cuitan.²⁵ Namun istilah kadrun dicuitkan sebanyak 155.374 kali. Ini menunjukkan intensitas penggunaan label kadrun tiga kali lipat lebih banyak dibanding label cebong. Sepanjang 2019-2020, Denny Siregar berhasil menjadi top influencer istilah kadrun. Data dari Drone Emprit menunjukkan jumlah retweet dan balasan soal cuitan kadrun itu mencapai 27.²⁶

Salah satu kasus yang diangkat dalam Penelitian adalah video dari channel Cokro TV yang berjudul "Danny Siregar: KADRUN ITU SIAPA?". Dalam video tersebut, Danny mengasosiasikan kadrun dengan pakaian gamis dan berjenggot. Ia juga menekankan bahwa kelompok ini identik dengan perilaku kekerasan. Narasi ini mengandung cacat logika karena umat Islam kadrun yang dibicarakan oleh Danny melalui identifikasi visual gamis dan jenggot adalah hal yang keliru. Ini yang disebut dalam kajian logika sebagai kekeliruan berfikir dengan melakukan generalisasi yang berlebihan (*Fallacy of Over Generalization*), penarikan kesimpulan umum semacam ini tidak didukung oleh bukti yang cukup.²⁷

Pertama, tidak semua umat Islam (bahkan mayoritas) yang berpakaian gamis dan atau berjenggot adalah pendukung kelompok Islam yang identik dengan perilaku kekerasan seperti yang dituduhkan oleh Danny siregar. Kedua, jika substansi perilaku yang dikiritik adalah kekerasan oleh orang yang berpakaian gamis atau berjenggot, tentu hal ini bersifat kasuistik dan lebih tepat sebagai tindakan oknum. Kita tidak bisa melabeli institusi kepolisian sebagai preman bersenjata hanya karena tindakan beberapa oknum polisi berseragam yang melakukan tindakan kekerasan dalam sebuah pengendalian demonstrasi misalnya. Demikian juga beberapa oknum polisi yang terjerat dalam kasus narkoba tidak serta merta menjadikan institusi Polri sebagai bandar narkoba negara. Kita juga tidak pantas menjuluki setiap orang yang berdasi atau berpakaian rapi sebagai koruptor hanya

²⁵ <https://tirto.id/pelabelan-kadrun-membungkam-pengkritik-rezim-memicu-konflik-sara-fXdR>(diakses 7 Juni 2021)

²⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/14/media-sosial-meningkatkan-polarisasi-politik-di-indonesia>

²⁷ Johnson, Bonnie Mc Daniel. (2009). *Communication: The Process of Organizing*. Inggris: Allyn and Bacon. Hal : 393

karena beberapa pejabat tinggi yang identik dengan setelan *outfit* tersebut telah terbukti melakukan tindakan korupsi.

Labelisasi kadrun yang awalnya menyerang kalangan opisisi beragama Islam kini justru digunakan untuk menyerang siapa saja yang bersikap opisisi. Bahkan dilansir dari media online detik.com, Persatuan Gereja Indonesia diserang oleh 'buzzer' sebagai pendukung kadrun. Hal ini terjadi setelah pertemuan Ketua PGI dengan Novel Baswedan di tengah kisruh tes wawasan kebangsaan pegawai KPK.

Temuan di atas membuktikan bahwa mitos koreksi religius dibalik label kadrun sebagai bentuk negasi politik identitas tidak sekadar dimaksudkan untuk mengolok-olok oposan muslim tertentu, tapi menjadi senjata "menggebuk" secara verbal semua kalangan yang bersikap tidak sejalan dengan pemerintah. Pada titik ini, isi motif politik telah tersingkap dari kemasan religiusnya. Dengan kata lain, identitas agama hanya menjadi pembungkus untuk menutupi kepentingan politik golongan. Hal ini tidak begitu mengherankan mengingat agama lekat dengan ikhwal kesucian.

Aksi dan reaksi di pusaran identitas agama ibarat lingkaran setan yang tak berujung. Labelisasi kadrun oleh para influencer istana justru dijawab dengan narasi ancaman *islamofobia*. Umat Islam kebanyakan tentu tidak ingin agamanya dianggap sebagai agama kekerasan atau agama teroris. Di lain pihak penggunaan agama secara negatif dalam politik akan merugikan partai politik yang memiliki basis umat Islam seperti PKB. "*Politik aliran yang menggunakan jargon negatif agama merugikan kita (partai PKB), contoh pada Pemilu 2019 kader PKB sulit bersaing di Toraja (pemilih non muslim)* ", terang Azhar Arsyad, S.H., Ketua DPW PKB Sulsel.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam akan dengan mudah dimobilisasi dengan menyentuh *thymos* identitas Islamnya. Pada dasarnya perang wacana identitas agama ini adalah hal wajar jika tidak ditunggangi oleh motif politik yang kuat. Sangat disayangkan jika keakraban sesama warga negara harus dikorbankan sebagai akibat dari manipulasi emosi oleh kaum demagog. Identitas agama dalam komunikasi politik, baik yang berposisi afirmatif maupun korektif menjadi teknik propaganda untuk memurnikan ambisi politik dibaliknya. Itu sebabnya narasi politik di ruang publik harus netral dari pertentangan identitas agama.

Kesimpulan

Kadrun adalah potret identitas agama sebagai komoditas propaganda politik. Kadrun syarat dengan stigma negatif terhadap simbol Islam yang bagi kalangan tertentu juga sekaligus dijadikan sebagai identitas agama Islam. Labelisasi 'kadrun' menjadi alat propaganda politik untuk menyerang kelompok oposisi baik muslim maupun non muslim. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat demokrasi yang memberikan kebebasan berpendapat bagi warga negara. Perbedaan pendapat harusnya diwadahi dalam dialog rasional yang jauh dari sentimen SARA. Labeling berbasis agama hanya akan mempertajam keterbelahan sosial. Jika kondisi ini terus-menerus dibiarkan terjadi maka Indonesia yang "Bhineka Tunggal Ika" terancam akan terpolarisasi menjadi "Bhineka Dwi Ika".

Di sisi lain, kritik Danny Siregar juga menjadi renungan bagi kalangan umat Islam dalam beroposisi. Proses demokrasi yang meniscayakan perbedaan politik dan kritik terhadap pemerintah harusnya netral dari komodifikasi identitas agama. Biarlah agama hadir sebagai sumber nilai dan kompas moral. Baiknya komunikasi politik tidak menggunakan identitas visual agama yang berpotensi mengaburkan pesan. Agama mengajarkan keadilan, kedamaian, kebersamaan, dan kepedulian. Identitas agama harusnya hadir dalam fondasi moral kebijakan publik dan opini politik, bukan sebagai kostum politik apalagi berakhir sebagai olok-olok politik. Agama kaya akan nilai dan ajaran yang sejalan dengan tujuan bernegara, agama tidak patut dimiskinkan menjadi alat propaganda semata.

Akhirnya sebagai saran dan agenda tindak lanjut, negara harus lebih tegas dan objektif dalam meregulasi keliruan politik di media digital yang dapat membahayakan integrasi bangsa. Tegas dalam hal ini adalah tidak diskriminatif. Sedangkan objektif maksudnya proporsional dalam menimbang kasus per kasus. Kedua, penyelenggara pemilu dan partai politik harusnya lebih berkomitmen dalam mewujudkan demokrasi rasional yang bebas dari sentimen SARA. Ketiga, saatnya media konvensional hadir sebagai centra media opini publik yang menjalankan fungsi sektrutinitas terhadap isu-isu publik. Keempat, ulama dan kaum agamawan hendaknya membatasi diri dari politik praktis yang mengkapitalisasi identitas agama. Sejalan dengan itu, umat akan mudah dalam membedakan yang mana isu kebijakan publik dan yang mana isu kehidupan beragama.

Daftar Pustaka

Buku

- Barthes, Roland. 2013. *Mitologi (Edisi Revisi)*. Nurhadi, A. Sihabul Millah (terj). Bantul: Kreasi Wacana.
- Becker, H. (1963). *Outsider: Studies In The Sociology Of Deviance*. New York: The Free Press.
- Cangara, Hafied. (2014). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Efriza & Indrawan, J. (2018). *Komunikasi Politik: Pemahaman Secara Teoritis dan Empiris*. Malang: Intrans Publishing.
- Fukuyma, Francis. (2018). *Identity: The Demand for Dignity and The Politics of Resentment*. New York: Farrar, Straus and Giroux
- Habermas, J. (2010). *Ruang Publik, Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis* (terj.). Bantul: Kreasi Wacana.
- Hartley, John.(2010). *Communication, Cultural And MediaStudies: Konsep Kunci*.Yogyakarta: Jalasutra.
- Heryanto, G. G., & dan Rumar, S. (2013). *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Johnson, Bonnie Mc Daniel. (2009). *Communication: The Process of Organizing*. Inggris: Allyn and Bacon.
- Lasswell, H. D., (1971). *Propaganda Technique in The World War I*. (revised ed.). Cambridge: M.I.T. Press.
- Mead, George Herbert. (1934). *Mind, Self, and Society*. ed. C. w. Morris. Chicago: University of Chicago.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Scheid, T.L. & Brown T.N., (2012). *A Handbook for the Study of Mental Health*. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Jurnal

- Aspinall, E., Dettman, S., & Warburton, E. (2011). *When Religion Trumps Ethnicity: A Regional Election Case Study From Indonesia*. 19(1), 27–58. <https://doi.org/10.5367/sear.2011.0034>
- Faridah, Siti, and Mathias, Jerico. (2018). *Politikasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa Dalam Pemilu*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Volume 4 No. 3, 489-506.
- Hadiz, V. R. (2018). *Imagine All the People? Mobilizing Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia*. *Journal of Contemporary Asia*, 48(4), 566–583.

- Indrawan, J. (2019). *Cyberpolitics sebagai Perspektif Baru Memahami Politik Era di Siber*. Jurnal Politika, 10(1), 1-15.
- Karim, Abdul Gafar. 2019. *Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan Bagi Agenda Riset*. Politika: Jurnal Ilmu Politik: Volume 10, NO. 2.
- Lim, M. (2017). *Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia*. 49(3), 27-411. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Marcus, M. (2018). *Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia*. Pacific Affairs, 91(2), 82-261. <https://doi.org/10.5509/201891226>
- Mietzner, M., Muhtadi, & Burhanuddin. (2018). *Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation*. Asian Studies Review, 42(3), 479-497. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>
- Waikar, Prashant, Nawab, M., & Osman, M. (2018). *Fear and Loathing: Uncivil Islamism and Indonesia's Anti-Ahok Movement*. Nanyang Technological University, 106, 89-109.

Internet

- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200814143813-192-535796/awal-mula-munculnya-istilah-cebong-kampret-kadrun-di-medsos> (diakses 7 Juni 2021)
- <https://tirto.id/pelabelan-kadrun-membungkam-pengkritik-rezim-memicu-konflik-sara-fXdR> (diakses 7 Juni 2021)
- <https://mediaindonesia.com/nusantara/319448/disebut-kadrun-warga-sumbar-laporkan-ade-armando> (diakses 7 Juni 2021)
- <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Pengguna%20internet%20di,dibandingkan%20pada%20Januari%202020%20lalu>. (diakses 4 Mei 2021)
- <https://tirto.id/pelabelan-kadrun-membungkam-pengkritik-rezim-memicu-konflik-sara-fXdR> (diakses 4 Mei 2021)
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/14/media-sosial-meningkatkan-polarisasi-politik-di-indonesia> (diakses 4 Mei 2021)
- Tapsell, R. (2017). Post-truth politics in Southeast Asia. Retrieved June 3, 2021, from Inside Story website: <https://insidestory.org.au/post-truth-politics-in-southeastasia>